

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT BERKELANJUTAN KABUPATEN TABALONG (Studi Kasus Pasar Muara Uya)

Ahmad Rijali Noor<sup>1</sup>, Irza Setiawan<sup>2</sup>, Nida Urahmah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : [ijalhajacoy@gmail.com](mailto:ijalhajacoy@gmail.com)

### ABSTRAK

Fenomena tidak tersedia beberapa sarana dan prasarana seperti pos keamanan tidak dikelola dan tidak ada parkir khusus, banyak pedagang menggunakan bahu jalan pasar, adanya kemacetan karena bangunan disediakan telah penuh, penataan pasar kurang tertata sesuai jualan pedagang, Tujuan penelitian mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya). Penelitian pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data sampel purposive sampling. Data dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian data, dan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, referensi dan member check. Hasil penelitian belum optimal Pertama, subvariabel komunikasi indikator transmisi dan kejelasan belum baik, konsisten cukup baik. Kedua, subvariabel sumber daya indikator staf dan wewenang cukup baik, fasilitas belum baik Ketiga, subvariabel disposisi indikator pengangkatan birokrasi dan insentif cukup baik. Keempat, subvariabel struktur birokrasi indikator SOP dan fregmentasi cukup baik. Faktor pendukung terjalin koordinasi baik antar badan pelaksana, faktor penghambat kurangnya tindakan tegas pelanggaran pasar dan kurangnya sosialisasi dilihat kurang jelasnya kebijakan. Disarankan: Kepala Disperindag Tabalong dan Kepala UPT Pasar Muara Uya melakukan sosialisasi dengan pedagang setiap 3 bulan.

**Kata kunci:** Implementasi, Pasar, Tabalong

### ABSTRACT

*The phenomenon of unavailability of several facilities and infrastructure such as security posts that are not managed and there is no special parking, many traders use the shoulder of the market road, there is traffic jam because the buildings provided are full, the market arrangement is less organized according to the traders' sales. The aim of the research is to find out the factors that influence the implementation of regulations. Regent Number 41 of 2021 concerning the Arrangement and Management of Sustainable People's Markets in Tabalong Regency (Case Study of Muara Uya Market). Qualitative research approach with descriptive type. Data collection techniques: interviews, observation and documentation. The sample data source was purposive sampling. The data was analyzed using reduction techniques, data presentation and conclusions. Testing the credibility of the data extends observations, increases persistence, triangulation, references and member checks. The research results are not optimal. First, the communication sub-variable indicators of transmission and clarity are not good, consistently quite good. Second, the resource sub-variable indicators for staff and authority are quite good, facilities are not good. Third, the disposition sub-variable for indicators of bureaucratic appointment and incentives is quite good. Fourth, the sub-variables of bureaucratic structure, indicators of SOP and segmentation, are quite good. The supporting factors are good coordination between implementing agencies, the inhibiting factors are the lack of firm action against market violations and the lack of socialization seen as a lack of clear policy. It is recommended: Head of the Tabalong Industry and Trade Department and Head of Muara Uya Market UPT carry out outreach with traders every 3 months.*

**Keywords:** Implementation, Market, Tabalong

## PENDAHULUAN

Pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya antara kepentingan konsumen atau satu sisi, dengan kepentingan produsen lain. Oleh karena itu, pasar memiliki banyak fungsi bagi pelaku ekonomi, yaitu konsumen, produsen, maupun pemerintah. Pasar berfungsi antara lain sebagai sumber informasi bagi konsumen, produsen bahkan juga pada pemerintah.

Dalam ('Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan', 2021) tentang pengelolaan pasar pemerintah kabupaten tabalong dijelaskan bahwa yang pasar merupakan salah satu entitas ekonomi strategis yang berfungsi mendinamisasi dan juga mengakselerasi percepatan ada pertumbuhan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan. Hal ini pasar yaitu merupakan pusat perekonomian masyarakat, baik untuk masyarakat yang berada dikalangan kelas bawah maupun kelas atas.

Adapun kekurangan lainnya dari pasar Muara Uya yaitu penataan pasar yang kurang tertata sesuai dengan pengelompokan susunan jualan karena di pasar Muara Uya tercampur dalam pengelompokan sesuai yang dijual dan pos keamanan yang tidak terpakai lagi hingga pasar kurang terjaga serta banyaknya parkir liar karena tidak adanya parker khusus yang dibangun pada pemerintah

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis diketahui adanya permasalahan yang muncul pada Muara Uya Kecamatan Muara Uya diantaranya:

1. Tidak tersedia beberapa sarana dan prasarana seperti pos keamanan yang tidak di kelola lagi dan tidak ada lahan parkir khusus yang disediakan oleh pemerintah, akibatnya menimbulkan banyaknya parkir liar disekitar lingkungan pasar , Hal ini melanggar peraturan Bupati No 41 tahun 2021, pasal 11 huruf g "pos keamanan" dan m "Tempat Parkir" serta pasal 12 ayat (3).
2. Masih banyak pedagang menggunakan bahu jalan di lingkungan pasar yang menimbulkan dengan adanya kemacetan karena bangunan yang disediakan telah penuh serta penataan pasar yang kurang tertata sesuai dengan dagangan jualan pedagang. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf e "Penataan Pedagang Pasar".

Menurut Ripley dan Franklin dalam buku (Mani and Guntoro, 2020), berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Harrold Laswell dan AbrahamKaplan dalam buku (Subarsono, 2013), berpendapat bahwa "kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Menurut (Agustino, 2016) menyebut model implementasi kebijakan publik yang dirumuskan oleh George C. Edward III terdapat 4 variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu:

### 1. Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para emplementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Ada tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi: penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula Seringkali dalm penyalur komunikasi terjadi salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses kominikasi sehingga apa yang diharapkan terdirtorsi ditengah jalan.

- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau ambigu.
  - c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah- ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan
2. Sumber daya
- a. Staf; kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai atau kompeten dibidangnya. Diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.
  - b. Informasi; dalam implementasi kebijakan , informasi mempunyai dua bentuk. *Pertama*, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana yang telah ditetapkan..
  - c. Wewenang; kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik
  - d. Fasilitas; fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang memadai, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif , maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, Indikator disposisi ada 2, yaitu :

- a. Pengangkatan birokrat; jika ingin kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
  - b. Insentif; pada umumnya, orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka manipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.
4. Struktur Birokrasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang telah dibuat, maka hal ini akan menghambat jalannya proses implementasi kebijakan publik. Menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah *Standar Operating Procedures* (SOPs) dan Fregmentasi.

Penataan pasar adalah proses pengaturan dan pengorganisasian ruang serta kegiatan di pasar guna menciptakan tata letak yang efisien, aman, dan nyaman bagi pedagang dan juga pengunjung. Pengelolaan pasar adalah proses dalam sebuah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan kegiatan yang bertujuan untuk mengatur dan mengelola pasar secara efektif dan efisien.

Berdasarkan fenomena tersebut oleh karena itu, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang diteliti mengenai “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya)”.

## Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono dalam (Pasalong, 2016) pada bukunya yang berjudul Metode Penelitian Administrasi Publik menyebutkan bahwa pendekatan metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan juga menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informasi relevan dan sebenarnya di lapangan melalui wawancara. Data Sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian kualitatif. Teknik penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman dalam buku (Sugiyono, 2022) terdapat 3 teknik analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## PEMBAHASAN

### 1. Komunikasi

Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Ada tiga indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi

#### a. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula Seringkali dalam penyalur komunikasi terjadi salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan di Kabupaten Tabalong ( Studi Kasus Pasar Muara Uya) mengenai transmisi belum baik karena UPT pasar dan stafnya yang menyampaikan sejumlah peraturan di pasar terhadap masyarakat tidak melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik terhadap masyarakat.

#### b. Kejelasan

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang penataan dan pengelolaan pasar rakyat mengenai kejelasan belum baik karena sasaran dalam kebijakan ini (masyarakat dan pembeli juga pedagang) tidak memahami tentang Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang penataan dan pengelolaan pasar rakyat berkelanjutan.

#### c. Konsistensi

Konsistensi merupakan perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah- ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang penataan dan pengelolaan pasar rakyat berkelanjutan mengenai konsisten cukup baik, peraturan ini konsisten dan dilaksanakan sejak 2021.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan, sebagaimana dijelaskan dalam teori George C. Edward III Beberapa aspek sumber daya yang perlu diperhatikan dalam konteks implementasi kebijakan adalah staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

### a. Staf

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai atau kompeten dibidangnya. Diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan (Studi Kasus Pasar Muara Uya) mengenai staf cukup baik, staf lapangan pada pasar Muara Uya ada 2 orang yang bertugas memberikan pengawasan dan pengarahan jalannya Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021.

### b. Informasi

Implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksan yang telah ditetapkan.

Implementasi Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya) mengenai informasi belum baik, karena informasi tentang kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tidak disampaikan secara langsung oleh UPT pasar kepada masyarakat.

### c. Wewenang

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Implementasi Peraturan Bupati mengenai wewenang cukup baik, wewenang atau kekuasaan ini dilaksanakan oleh UPT Pasar, baik dalam pengelolaan pasar seperti koordinasi keamanan, koordinasi penagihan, tata laksana pasar, melaksanakan koordinasi layanan teknis administrative dan lain-lain.

### d. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang memadai, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya Kecamatan Muara Uya) mengenai fasilitas belum baik, seperti minimnya tempat untuk berdagang sehingga harus berjualan dibahu jalan, jalan yang masih banyak berlobang sehingga menyebabkan jalan menjadi becek ketika dikunjungi, pos keamanan yang tidak dikelola lagi, tidak tersedianya parkir khusus sehingga menyebabkan banyaknya parkir liar, tidak terkontrolnya kendaraan yang masuk kedalam pasar sehingga mengganggu aktivitas pasar, dan limbah-limbah atau pembuangan sampah yang tidak berfungsi, karena masyarakat

lebih memilih membuang sampah sembarangan, serta data dari UPT Pasar mengenai jumlah toko tidak input oleh petugas/pegawai UPT Pasar Muara Uya yang jumlahnya ada tiga puluh tujuh (37) toko di seluruh pasar muara uya..

### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan efektif, maka pelaksana kebijakan tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, Indikator disposisi ada 2, yaitu:

#### a. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat jika ingin kebijakan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong ( Studi Kasus Pasar Muara Uya) mengenai pengangkatan birokrasi baik, pengangkatan birokrasi diserahkan kepada UPT pasar sebagai pelaksana dan pengawas terhadap jalannya pasar dibantu oleh Dinas Perhubungan selaku penagih dan penanganan retribusi.

#### b. Insentif

Insentif pada umumnya, orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan dapat mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat berkelanjutan Kabupaten Tabalong mengenai insentif cukup baik karena orang-orang yang terlibat dalam implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 mendapat gaji setiap bulannya.

### 4. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III (Leo Agustino 2016:136), struktur birokrasi merupakan bagian integral dari implementasi kebijakan yang efektif. Mereka mengemukakan bahwa struktur birokrasi memainkan peran kunci dalam menentukan bagaimana kebijakan diterapkan dan dijalankan di tingkat pelaksanaan. Struktur birokrasi mencakup organisasi dan hierarki berjenjang yang terdiri dari berbagai tingkatan, peran, dan tanggung jawab.

#### a. Membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang lebih Fleksibel

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang telah dibuat, maka hal ini akan menghambat jalannya proses implementasi kebijakan publik.

implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong mengenai SOP cukup baik karena kegiatan pasar sesuai dengan SOP yang ada.

#### b. Fregmentasi

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang telah dibuat, maka hal ini akan menghambat jalannya proses implementasi kebijakan publik.

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong ( Studi Kasus Pasar Muara Uya) mengenai fregmentasi atau tanggung jawab cukup baik karena sudah

terlaksana sesuai dengan arahan yakni pengelolaan pasar dilaksanakan oleh UPT pasar dengan tanggung jawab kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Tabalong.

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya)

1. Faktor Pendukung
  - a. Partisipasi Masyarakat dan Pedagang
  - b. Koordinasi antar badan pelaksana berjalan dengan baik
2. Faktor Penghambat
  - a. Kurangnya Tindakan Tegas Terhadap Pelanggaran di Pasar

## SIMPULAN

Implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya) belum baik yakni :*Pertama*, sub variabel komunikasi di ketahui indikator transmisi belum baik media transmisinya adalah UPT Pasar dan Stafnya yang menyampaikan sejumlah peraturan di pasar terhadap masyarakat tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya sosialisasi, indikator kejelasan belum baik karena sasaran dalam kebijakan ini pedagang tidak memahami tentang Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya), Indikator konsisten cukup baik. *Kedua*, sub variabel sumber daya diketahui indikator staf cukup baik karena ada pegawai yang bertugas dilapangan terkait Implementasi perda, indikator wewenang cukup baik karena wewenang atau kekuasaan ini dilaksanakan oleh UPT Pasar bekerja sama dengan Disperindag Tabalong, baik dalam pengelolaan pasar seperti koordinasi keamanan, koordinasi penagihan tata laksana pasar, melaksanakan koordinasi layanan teknis administrative dan lain-lain, indikator fasilitas belum baik karena fasilitas belum tersedia dengan baik. *Ketiga*, sub variabel Disposisi diketahui indikator pengangkatan birokrasi cukup baik karena pengangkatan birokrasi diserahkan kepada UPT Pasar, indikator insentif cukup baik karena ada gaji yang diberikan kepada pegawai yang terlihat dalam pelaksanaan kebijakan dipasar muara uya. *Keempat*, sub variabel struktur birokrasi diketahui indikator SOP cukup baik karena kegiatan pasar sesuai dengan SOP yang ada, indikator fragmentasi atau tanggung jawab cukup baik karena sudah terlaksana sesuai dengan tanggung jawab kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKMKabupaten Tabalong.

Faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya) terbagi menjadi dua, *Pertama* faktor pendukung:terjalin koordinasi yang baik antar badan pelaksana dan Partisipasi Masyarakat dan Pedagang. *Kedua*, faktor penghambat meliputi : kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran di pasar.



## DAFTAR PUSTAKA

- Affrian, R., Sos, S. and AP, M. (2023) *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. CV. Bintang Semesta Media.
- Agustino, L. (2016) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mani, L. and Guntoro, B. (2020) *Budaya dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik Teori dan Contoh Kasus Aplikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pasalong, H. (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- ‘Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan’ (2021). Tanjung, Tabalong.
- Saputra, T. *et al.* (2023) ‘Bibliometric Studies and Public Administration Research Potential on Stunting Problems’, *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 6(2), pp. 197–211.
- Setiawan, I., Sukristyanto, A. and Ibnu Rochim, A. (2021) ‘The Implementation of Law Number 16 of 2019 a Case Study of Early Marriage Prevention in Hulu Sungai Utara Regency Indonesia’, *Journal of Public Policy and Administration*, 5(3), p. 117.
- Subarsono (2013) *Analisis Kebijakan Publik*. Jogja: Pustaka Belajar.
- Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*. 3rd edn. Edited by S.Y. Suryandari. Bandung: Alfabeta.